



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**TRANSLATION TECHNIQUES AND ACCEPTABILITY
ASPECT OF LEGAL TERMS IN NOUN PHRASE
ON JUDICIAL COMMISSION WEBSITE**

THESIS

Proposed As Compulsory Prerequisite
for Bachelor's Degree in Applied Linguistic (S.Tr.Li)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Shadana Hayata Nufiedia

2108412011

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION
DEPARTMENT OF BUSSINESS ADMINISTRATION**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRONOUNCEMENT

I, the undersigned:

Student Name : Shadana Hayata Nurfiedia
Student ID : 2108412011
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**
Thesis Title : Translation Techniques and Acceptability Aspect of Legal Terms in Noun Phrases on The Judicial Commission Website

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or any form of imitation of others' works. All quotations and references from other sources have been appropriately cited following the applicable guidelines for academic writing.

If then this pronouncement proves false, I am willing to accept any academic punishment.

Depok, 14 July 2025

The declarant



Shadana Hayata Nurfiedia
2108412011



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEGITIMATION

The following thesis is proposed by:

Student Name : Shadana Hayata Nurfiedia
Student ID : 2108412011
Study Program : English for Business and Professional Communication
(BISPRO)
Thesis Title : Translation Techniques and Acceptability Aspect of Legal Terms
in Noun Phrases on The Judicial Commission Website

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on 14th July 2025 and
decided "PASSED"

Board of Thesis Examiners		Signature
Head of Examiner & Examiner 1	: Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl, TESOL., M.M., M.Hum.	
Examiner 2	: Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd.	
Examiner 3	: Sujiwo Priambodo, S.E., M.M.	

Under the supervision of Board of Thesis Supervisors

Board of Thesis Supervisors		Signature
Supervisor 1	: Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl, TESOL., M.M., M.Hum.	
Supervisor 2	: Farizka Humolungo, S.Pd., M.A.	

Legalized by:
Head of Department
Business Administration



Dr. Wanyudi Utomo, S.Sos., M.Si.
NIP 198007112015041001

Depok, 14 July 2025

Acknowledged by:
Head of Study Program
English for Business and Professional Communication
(BISPRO)

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. All praise and gratitude be to Allah SWT, the Lord of the universe, for granting the health and strength that enabled the writer to complete this final project. The journey of writing this thesis has been a remarkable experience and an important step in fulfilling the academic requirement for the D4 degree in English for Business and Professional Communication, under the Department of Commercial Administration at Politeknik Negeri Jakarta. This thesis would not have been completed without the guidance, support, assistance, and encouragement from many individuals and institutions. Therefore, the writer would like to express special thanks to the following:

1. Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum., as the Head of English for Business and Professional Communication Study Program as well as the first supervisor, I thank you for all the guidance, support, direction, advice, and patience that you have given me from the beginning to the end of the process of preparing this thesis.
2. Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. as the second supervisor, thank you for your guidance, support, and direction during the process of writing this thesis.
3. To my parents, who have provided tremendous support both morally and financially-especially my mother-I express my deepest gratitude. I dedicate this thesis to my beloved father and mother, who have brought so much happiness and love into my life. Thank you for all your love, prayers, and invaluable sacrifices.
4. To the raters, Ma'am Inanti Pinitakasih Diran and Ma'am Katherina Wiksmadhara, I thank you for your time and contribution in assessing this research.
5. I would also like to thank my classmates: Cut Keisya Rahma Kirana, Dhita Sukma Mahastri, Nisrina Prilandhia, Henny, Wina Saviera Fidela, Annisa Zahra Auliany, Razita Marsya Sahira, Adhimasandya Harsaning, and Wildan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ersa Syuhada, who have faithfully accompanied, encouraged, supported, and helped since the beginning of the lecture until the process of preparing this thesis was completed.

6. Last, but not least, I would like to thank myself. Thank you for believing in yourself, continuing to strive with passion, and being able to persevere in the face of various challenges. Thank you for your grit, courage, and commitment to never give up on this journey.

In conclusion, the researcher sincerely hopes that everyone who has offered their support will be blessed with kindness and rewarded by Allah SWT. It is also the researcher wish that this thesis may bring benefits and be of value to others.

Bogor, June 2025



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTERESTS

I, the undersigned:

Student Name : Shadana Hayata Nurfiedia
Student ID : 2108412011
Study Program : English for Business and Professional Communication
(BISPRO)
Department : Business Administration
Manuscript : Thesis (*Skripsi*)

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to Politeknik Negeri Jakarta Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

Translation Techniques and Acceptability Aspect of Legal Terms
in Noun Phrases on The Judicial Commission Website

along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, Politeknik Negeri Jakarta reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author/creator and copyright holder.

In witness whereof, I hereby make this statement truthfully.

Made in : Depok,
On the date of : 14 July 2025
Declared by :

Shadana Hayata Nurfiedia

Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Shadana Hayata Nufiedia, Business Administration, English for Business and Professional Communication

This study aims to identify the types of noun phrases containing legal terms in the most-read news articles on the Judicial Commission website from January 2024 to January 2025. This study also analyzes the translation techniques used and evaluates the acceptability of the translation results. The method used is a qualitative descriptive method to identify the types of noun phrases, translation techniques, and translation quality. Data collection was conducted by accessing the most widely read news articles, then sampling noun phrases containing legal terms. These phrases were classified based on Widjono's theory (2007), analyzed using Molina and Albir's theory (2002), and evaluated for acceptability by raters through the Focus Group Discussion method. The results of the study show that the most dominant type of noun phrase is the modifying noun phrase, with 97 data points (91%) of 106 noun phrases. The most commonly used translation technique is literal translation, with 56 data points (53%). The translation acceptability score averaged 2.48, indicating that the translations generally used words that were well accepted by the target readers.

Keywords: Noun phrases, legal terms, translation techniques, translation quality.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Shadana Hayata Nufiedia, Administrasi Niaga, Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis frasa nomina yang mengandung istilah hukum dalam artikel berita yang paling banyak dibaca di situs web Komisi Yudisial dari Januari 2024 hingga Januari 2025. Penelitian ini juga menganalisis teknik terjemahan yang digunakan dan mengevaluasi keterimaan hasil terjemahan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi jenis frasa nomina, teknik terjemahan, dan kualitas terjemahan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses artikel berita yang paling banyak dibaca, kemudian mengambil sampel frasa nomina yang mengandung istilah hukum. Frasa-frasa ini diklasifikasikan berdasarkan teori Widjono (2007), dianalisis menggunakan teori Molina dan Albir (2002), dan dievaluasi kelayakannya oleh penilai melalui metode FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis frasa nomina yang paling dominan adalah frasa nomina modifikasi, dengan 97 data poin (91%) dari 106 frasa nomina. Teknik terjemahan yang paling sering digunakan adalah terjemahan harfiah, dengan 56 data poin (53%). Skor penerimaan terjemahan rata-rata 2,48, menunjukkan bahwa terjemahan umumnya menggunakan kata-kata yang diterima dengan baik oleh pembaca sasaran.

Kata kunci: Frasa nomina, istilah-istilah hukum, teknik terjemahan, kualitas terjemahan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Table of Content

PREFACE.....	i
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
CHAPTER 1	
INTRODUCTION.....	1
1.1 Background of The Study.....	1
1.2 Statement of The Problem.....	6
1.3 Objective of The Study.....	7
1.4 Significance of The Study.....	7
CHAPTER II	
LITERATURE REVIEW.....	9
2.1 Theoretical Review.....	9
2.1.1 Translation.....	9
2.2 Translation Techniques.....	10
2.3 News Text.....	13
2.3.1 Characteristic of New Texts.....	13
2.4 Official Website of Judicial Commission.....	14
2.5 English Legal Language.....	15
2.5.1 Characteristic of English Legal Language.....	15
2.5.1.1 Legal Texts.....	16
2.6 Legal Terminology.....	16
2.7 Foreign Term.....	17
2.8 Phrase.....	18
2.9 Noun.....	19
2.10 Noun Phrase.....	20
2.10.1 Types of Noun Phrase.....	21
2.11 Translation Quality.....	23
2.12 Review of Relevant Studies.....	24
2.13 Theoretical Review.....	27
CHAPTER III	
RESEARCH METHOD.....	28
3.1 Research Design.....	28
3.2 Data and Data Source.....	29



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2.1 Data.....	29
3.2.2 Source Data.....	29
3.3 Sampling Techniques.....	29
3.4 Data Collection Techniques.....	32
3.4.1 Content Analysis.....	32
3.4.2 Focus Group Discussion.....	33
3.5 Data Validity.....	33
3.5.1 Triangulation of Data Source.....	34
3.5.2 Triangulation of Methods.....	34
3.6 Data Analysis.....	34
3.6.1 Domain Analysis.....	35
3.6.2 Taxonomy Analysis.....	36
3.6.3 Componential Analysis.....	37
3.7 Cultural Theme Analysis.....	38
CHAPTER IV	
RESULT AND DISCUSSION.....	39
4.1 Research Findings.....	39
4.1.1 Classification of Noun Phrases.....	40
4.1.2 Translation Techniques.....	45
4.1.3 Acceptability Aspect.....	50
4.1.4 Relationship Between Types of Noun Phrases, Translation Techniques, and Acceptability Aspect.....	54
CHAPTER V	
CONCLUSION AND SUGGESTION.....	57
5.1 Conclusion.....	57
5.2 Suggestion.....	58
REFERENCES.....	62
CURRICULUM VITAE.....	63
APPENDIX.....	64



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Tabel 2.4 Parameters of Quality Acceptability Translation.....	19
Tabel 3.6.1 Example of Domain Anlysis.....	28
Tabel 3.6.2 Example of Taxonomy Anlysis.....	29
Tabel 3.6.3 Example of Componentional Anlaysia.....	32
Tabel 3.3 List of News Text.....	37
Tabel 4.2 Classification of Noun Phrases.....	45
Tabel 4.3 Classifiacion of Translation Techniques.....	49
Tabel 4.4 Classification of Acceptability Aspect.....	54
Tabel 4.5 Relationship Between Noun Phrases Types, Translation Techniques, and Acceptability Aspect.....	61





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF FIGURE

Figure 2.5 Theoretical Framework.....	22
Figure 3.6 Spradley’s Analysis Scheme.....	27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background of The Study

The Judicial Commission of the Republic of Indonesia plays a vital role in overseeing the integrity and conduct of judges, as well as promoting transparency and accountability within the judicial system. One of its efforts in fulfilling this role is the regular publication of legal news articles on its official website. These texts serve as an essential medium for conveying information related to judicial affairs, court decisions, and institutional developments to the general public, legal practitioners, and international stakeholders. Therefore, the language used in these texts must be clear, accurate, and accessible to a diverse readership. Given the legal nature of the content, these texts are rich in complex noun phrases that convey formal and specific legal meanings. Legal terminology, which often reflects regulations, statutes, and particular judicial functions, plays a crucial role in this process. For example, terms such as *judge*, *court decision*, and *legislation* not only represent legal concepts but also reflect specific actions, authorities, and institutional roles. If these terms are translated inaccurately or too literally, they can mislead readers or distort the intended legal meaning. Thus, the translation of legal news texts, particularly into English, becomes essential not only for national transparency but also to facilitate international legal communication and collaboration.

The Judicial Commission of the Republic of Indonesia plays a vital role in overseeing the integrity and conduct of judges, as well as promoting transparency and accountability within the judicial system. One of its efforts in fulfilling this role is the regular publication of legal news articles on its official website. These texts serve as an essential medium for conveying information related to judicial affairs, court decisions, and institutional developments to the general public, legal practitioners, and international stakeholders. Therefore, the language used in these texts must be clear, accurate, and accessible to a diverse readership. Given the legal nature of the content, these texts are rich in complex noun phrases that convey formal and specific legal meanings. Legal terminology, which often



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

reflects regulations, statutes, and particular judicial functions, plays a crucial role in this process. For example, terms such as *judge*, *court decision*, and *legislation* not only represent legal concepts but also reflect specific actions, authorities, and institutional roles. If these terms are translated inaccurately or too literally, they can mislead readers or distort the intended legal meaning. Thus, the translation of legal news texts, particularly into English, becomes essential not only for national transparency but also to facilitate international legal communication and collaboration.

Legal translation is a highly specialized field that requires not only linguistic competence but also a deep understanding of legal terminology and the legal systems involved. One of the core components in legal texts is the use of noun phrases, which frequently appear in legal documents, court decisions, contracts, and legal news articles. Noun phrases in legal texts often have complex structures and carry specific legal meanings that are not easily transferable into the target language. For instance, terms like *judge*, *court decision*, and *legislation* not only denote legal concepts but also entail institutional actions, authority, and functions. If these phrases are mistranslated, they can mislead readers and alter the intended legal meaning. Therefore, the accurate translation of these phrases is crucial to preserve the clarity, validity, and legal intent of the original message.

To enhance public access to information related to legal processes and judicial activities, the Judicial Commission of the Republic of Indonesia regularly publishes legal news texts on its official website. These texts are sometimes translated into English to reach a broader audience, including international observers, legal scholars, and foreign institutions. However, due to the complexity and specificity of legal language, translating these texts presents significant challenges, especially in ensuring that noun phrases in the source language are accurately and appropriately rendered in the target language. In Indonesian, noun phrases typically follow a different syntactic structure than in English, particularly in the ordering of words and the use of determiners and adjectives. For example, in Indonesian, adjectives or possessive pronouns usually follow the noun, while in English, they precede it. Additionally, the use of determiners in Indonesian (such as *sebuah*, *yang*, *tersebut*) functions differently from their English counterparts



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(such as *a, the, this*). In English, articles like *the* function as markers of specificity within a noun phrase. Modifiers in Indonesian legal noun phrases, such as *peraturan pemerintah* (government regulation) or *putusan hakim* (judge's decision), typically follow the noun they modify. Conversely, in English, these modifiers come before the noun. These syntactic differences require careful attention during the translation process to preserve the intended meaning. Moreover, the use of determiners in both languages necessitates strategic choices, as determiners are often omitted in Indonesian contexts where they are necessary for clarity and specificity in English.

According to Baker (2018), legal translation is not merely a matter of word-for-word substitution; rather, it requires careful consideration of legal equivalence and contextual appropriateness. Newmark (1998) also emphasizes that translators must retain the intended meaning while ensuring that the translation conforms to the norms and conventions of the target language. The selection of appropriate translation techniques is crucial to achieving this goal, particularly when dealing with legal noun phrases that carry formal and binding implications. This study focuses on analyzing the translation techniques applied to noun phrases containing legal terminology and their acceptability in legal news texts published by the Judicial Commission. The translation techniques employed refer to the classification proposed by Molina and Albir (2002), who identified 18 translation techniques applicable in various contexts. To assess the quality of translation, this study uses Nababan's (2012) translation quality assessment model, with a specific focus on the acceptability aspect. Acceptability evaluates the extent to which the translation adheres to the linguistic and cultural norms of the target language and is perceived as natural and appropriate by the intended audience.

Unlike literary or audiovisual translation, legal texts demand a high level of precision and formality. Noun phrases, in particular, often contain complex modifiers, prepositional phrases, and compound structures that pose challenges in maintaining grammatical cohesion and legal clarity in translation. Furthermore, legal terminology can be highly specific to particular legal systems, adding complexity to the translation process. For example, terms such as *putusan sela* (interlocutory decision) or *putusan inkracht* (final and binding decision) require



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

deep understanding of Indonesian legal procedures as they may not have direct equivalents in other jurisdictions. Therefore, translators must make careful decisions regarding structure, terminology, and language style in the translated text to meet the expectations of a legal audience.

Several previous studies have discussed the translation of noun phrases in various contexts and provided valuable insights into the use of translation techniques and translation quality assessment. For instance, Astuti (2020), in her study titled *Translation Techniques of Noun Phrases in Legal Documents*, analyzed techniques used to translate noun phrases in international contracts. Her findings indicate that techniques such as literal translation, modulation, and transposition are commonly employed to deal with the rigidity and formality of legal language. However, her study focuses on static legal documents such as contracts and agreements and does not consider legal news texts, which are more dynamic and accessible to the public. This contextual difference highlights the challenges of adapting formal legal language into a more flexible and communicative news article format.

Similarly, Harahap (2019) explored the challenges of translating court verdicts in his study titled *Legal Translation Challenges in Translating Court Verdicts*. His research primarily addressed the syntactic complexity and legal terminology, showing that translators often struggle to maintain legal accuracy and grammatical cohesion in the target language. While this study is relevant in addressing general legal translation difficulties, it does not specifically examine noun phrase structures or assess the acceptability of translations from the perspective of the target audience. Harahap's focus is more on structural challenges in legal translation, whereas this research specifically investigates noun phrases in greater depth.

Another relevant study by Rahmawati (2021), titled *An Analysis of Translation Accuracy and Acceptability in Government Regulations*, evaluated translation quality using Nababan's (2012) model. Although using the same framework as this study, her focus was on government regulations rather than legal news texts. Moreover, Rahmawati placed greater emphasis on sentence-level analysis, whereas this study delves deeper into the structural and functional aspects of noun



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

phrases in legal news contexts, providing a new perspective on handling complex structures in translation.

In the realm of legal news, there remains limited research. One notable study is by Putri (2022), titled *Translation Strategies of Legal Terminology in Online News Portals*, which partially discusses the phenomenon of translating legal language in news formats. However, her study focuses more on terminological choices, such as how specific legal terms are rendered in English, rather than the broader grammatical structures such as noun phrases. Thus, although her research shares the same source text type legal news its focus and linguistic depth differ significantly from this study. Putri's emphasis on terminological choices over grammatical structures highlights a gap that this research seeks to fill by focusing specifically on the translation of noun phrases with substantial semantic load in legal discourse.

Based on this review, it can be concluded that although several studies have explored legal translation from various perspectives such as translation techniques, challenges, or quality assessment, there remains a gap in research that specifically analyzes the translation techniques and acceptability of noun phrases containing legal terminology in legal news texts published by government institutions like the Judicial Commission of the Republic of Indonesia. One pressing issue that underscores the urgency of this research is the limited number of legal translators at the Judicial Commission. Currently, only one translator is responsible for this task, and this individual lacks a legal background, further complicating the accuracy and quality of translations. The shortage of competent legal translators can result in misinterpretation of judicial information, ultimately undermining the integrity and transparency of the legal system. Given the importance of digital governance and the increasing reliance on official websites for public access to legal information, addressing this issue is crucial to ensure effective legal communication at both national and international levels. The novelty of this study lies in its specific focus on noun phrases a grammatical unit bearing significant semantic weight in legal discourse and its application within legal news texts, a genre relatively underexplored in legal translation studies. Additionally, by integrating the translation technique framework by Molina and Albir (2002) with



Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nababan's (2012) translation quality assessment model specifically the acceptability aspect this study offers a methodological approach that bridges linguistic form, translation strategy, and reader perception. This integrative perspective aims to provide a deeper understanding of how legal language is faithfully, accurately, and accessibly transferred across languages for the target audience.

This study aims to fill the gap in existing literature by examining how noun phrases are translated in legal news texts and assessing how acceptable these translations are to the target audience. Although legal news texts are not legally binding like laws or contracts, they still require clarity and accuracy due to their informative and formal nature. These texts often contain official terminology and institutional references that must be carefully translated to maintain credibility and transparency. Therefore, this study is important for evaluating how translation techniques affect the acceptability of noun phrases in legal news and contributes to improving the quality of legal translation practices in Indonesia.

1.2 Statement of The Problem

Based on the background outlined earlier, the formulation of the research problems in this study are as follows:

1. What are the forms of noun phrases in News Texts of Judicial Commission?
2. What translation techniques are use in translating noun phrases in legal news texts on the official website of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia?
3. What is the translation quality of the noun phrases in terms of acceptability?

1.3 Objective of The Study

This study aims to:

1. To identify the form of noun phrases in Indonesian news text on Judicial Commission of Republic of Indonesia.
2. To determine the translation techniques of the noun phrases



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. To explain the acceptability quality of translations of noun phrases in news texts containing legal terminology.

1.4 Limitation of The Study

The scope of this research is limited to the 32 most read legal news texts with a time range of January 2024 – January 2025 on the official website of the Judicial Commission. In this study, research restrictions are carried out so that the discussion is more focused and clear. Therefore, the limitations of this research are:

a. Object of Research

This research only focuses on the analysis of appositive, coordinative, and modificative noun phrases in News texts published by the Judicial Commission.

b. Analyzed Aspects

This research analyzes three main aspects, types of noun phrases, translation techniques, and acceptability quality

c. Research Data

The data analyzed are excerpts of noun phrases containing legal terminology contained in news texts and their translated versions.

d. Data Source

This research only uses the original document in Indonesian and English translation as the main data source. Additional references in the form of previous research or articles are used as supporting theory.

1.5 Significances of The Study

This study offers two primary contributions: theoretical significance and practical significance:

a. Theoretical

This research is intended to enhance the body of knowledge in translation studies, particularly in the area of legal text translation. It is also expected to be a valuable reference for future researcher who are interested in exploring translation techniques and the quality of noun phrase translations in legal



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

contexts

a. Practical

From a practical perspective, the outcomes of this study can guide legal translators in selecting effective translation techniques to produce higher-quality noun phrase translations. Moreover, the study's findings can assist government institutions in preparing legal documents that are more precise and easily comprehensible for international readers, thereby fostering a clearer understanding of Indonesia's legal system on a global scale.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER V

CONCLUSION AND SUGGESTION

5.1 Conclusion

1. Types of Noun Phrases

Among the three types of noun phrases classified in the translation of the news text on the website commissionyudisial.go.id on May 11, 2025, modified, coordinative, and appositive noun phrases were found. Among the three types, modified noun phrases are the most used in this translation.

2. Translation Techniques

Among seven translation techniques used in translating the news text of komisiyudisial.go.id on May 11, 2025, literal translation, modulation, established equivalence, transposition, reduction, discursive creation, borrowing, and reduction are found. The most used techniques, literal translation and modulation.

3. Acceptability Aspect

In terms of translation acceptability, the average acceptability score obtained for the news text on the komisiyudisial.go.id website on June 9, 2025 is , it can be concluded that the translation has less acceptable, The translation has been accepted by readers and is relatively natural, and the sentence structure complies with linguistic rules, but there are several legal terms that are not used in accordance with legal conventions.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Suggestion

1. Translators within the Judicial Commission are advised to improve consistency in translating abbreviations and acronyms by referring to official translation guidelines or institutional glossaries. In addition, translators are also expected to participate in regular training related to the translation of legal and governmental texts to align with language developments and institutional policies. Finally, the editing and review process (revision and proofreading) should be conducted systematically to ensure the readability and acceptability of the translation results.
2. For future research, it is recommended to explore other aspects of translation quality, such as accuracy or readability, and to use other linguistic units such as verb phrases or adjective phrases.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Albir, M. &. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach.
- Amani, H. Z. (2023). THE EQUIVALENT OF ARCHAIC WORDS IN MODERN ENGLISH, A STUDY ON THE TRANSLATION OF LAWS AND REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Astuti. (2020). Revealing the Myths and The Truth in Translation .
- Astuti. (2020). Translation Techniques in Translating Legal Documents.
- Baker, M. (2018). *In Other Words a Coursebook on Translation* . London: Routledge.
- Biber et al. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Longman .
- Biel. (2014). *Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law*. Bern: Peter Lang.
- Biel, L. (2014). Translation of Multilingual EU Legislation as a Sub-genre of Legal Translation.
- Cao. (2007). *Translating Law*. Cambridge UP.
- CAO. (2010). *Chief Administrative Officer* .
- Chauhan, S. (2013). Cultural Issues in Translation.
- Davy, D. C. (1996). *Investigating English Style*. Indiana University Press.
- Dictionary, O. E. (2023). *Oxford English Dictionary* . Oxford University Press.
- Fabriyani. (2016). The Translation of Noun Phrases in the Novel Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief.
- First, E. E. (2020). EF Education First .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Hadi. (1998). *Metedologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Harahap. (2019). *Translation of Court Verdicts*.
- Harahap. (2019). *Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD* .
- Haryono. (2002). *Mtodologi Penelitian* . Semarang .
- Hasan Alwi, S. D. (2003). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka .
- Hughes, A. &. (2002). *Legal Translation Explain* . Manchester : Routledge .
- Indonesia, C. (2021). *"WHO Research: Omicron Spreads Faster and Weakens Vaccines"* .
- Karjo. (n.d.). 2015. *Challenges in Translating English Legal Texts into Indonesian*.
- Kridalaksana, H. (1998). *Kamus Linguistik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .
- Magelang, U. T. (2021). *Jurnal Teaching of Tidar University*.
- Murici. (2016). *Issues in Translating Legal Texts* . UELTS Volume 4.
- Nababan. (2003). *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*. Yogyakarta : Pustaka Jakarta .
- Nababan (2012). *Pengembangan Model Penelitian Kualitas Terjemahan* .
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian* . Jakarta : Ghalia Indonesia .
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. London : Prentice Hall .
- Nugroho. (2020). *The Translation of Immigration Law Texts*.
- Nurmalasari, A. (2023). *AN ANALYSIS OF TRANSLATION TECHNIQUES AND READABILITY OF NOUN PHRASE IN THE CABINET SECRETARIAT WEBSITE NEWS TEXT*.
- Pullum, H. &. (2002). *The Cambridge Grammar of the English Language*. Cambridge University Press.
- Putri. (2022). *Translation Strategies of Legal Terminology in Online News*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Portals.

- Putri, G. A. (2020). *Analyzing Students Cultural Knowledge* .
- Rahmawati. (2020). "Are You Ready?" Revisiting Needs Analysis .
- Rahmawati. (2021). *Analysis of Translation Accuracy and Acceptability in Government Regulation*.
- Ramlan. (1987). *Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Yogyakarta : Andi Offset .
- Randolph Quirk, S. G. (1985). *A Comprehensive Grammar of the English Language* . Longman .
- Rdford. (1988). *Transformational Grammar: A First Course*. Cambridge University Press.
- Roberts, N. (2011). *Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax*. London: Routledge .
- Santosa. (2016). *Fundamental Problems in Legal Translation*.
- Santosa. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kebudayaan (Pendekatan Praktis Penelitian Wacana dan Budaya)*. Surakarta: UNS Press.
- Santosa. (2021). *Translation Shifts of Noun Phrases in Edgar Allan Poe's Short Story The Black Cat*.
- Santosa. (2021). *Translation Studies: An Introduction*. Surakarta : UNS Press.
- Santosa, R. (2020). *Translation Shift in Legal Texts*.
- Saragih. (2020). *An Analysis of the Syntactic Complexity of Noun Phrases in Legal English*.
- Saragih. (2020). *The Translation of Phrasal Verbs in the Novel Thirteen Reasons Why*” oleh Ance Elsy Saragih.
- Sarevic, S. (2000). *Legal Translation and Translation Theory*” (dalam lanjutan dari *New Approach to Legal Translation*). Kluwer Law International .
- Song. (2013). *A Cognitive Approach to Legal Translation*.
- Spardley. (1998). *Participant Observation*. Newyork : Holt, Rinehart, Winston .
- Sriyono. (2014). *Terjemahan Tema Pada Teks Hukum* . Addabiyat .



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.

taber, N. &. (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Brill.

Tiersma, P. M. (1999). *Legal Language* . University of Chicago Press.

VI, K. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*. Badan Bahasa, Kemendikbudrsitek .

Widjono. (2007). *Bahasa Indonesia: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Grasindo.

Yudisial, K. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI*. Komisi Yudisial RI .



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CURICULLUM VITAE

Shadana Hayata Nufiedia

Bogor, West Java

shadana.hayata.nufiedia.an21@Mhsw.pnj.ac.id

Shadana Hayata Nufiedia was a final-year student at the Jakarta State Polytechnic when she completed this research. She was born in Jakarta on July 14, 2002, and attended MAN 2 Jakarta for her secondary education. After graduating, she continued her undergraduate studies in the English for Business and Professional Communication program, focusing on translation from English to Indonesian and vice versa. During her sixth semester, she participated in an internship program at the National Archives of the Republic of Indonesia in the Department of International and Domestic Cooperation, where she assisted translators in translating various official documents. In her seventh semester, she continued her internship at the Judicial Commission of the Republic of Indonesia, specifically at the Center for Analysis and Information Services, with similar duties, namely assisting in the translation of institutional documents. Her internship experience at these two institutions further deepened her knowledge and skills in the field of translation, particularly in relation to legal texts and official documents.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDIX

No	Source Language (SL)	Target Language (TL)	Types of Noun Phrases			Translation Techniques	Acceptability Aspects		
			Modified	Coordinative	Appositive		3	2	1
1.	Komisi Yudisial (KY) memberikan perhatian khusus dalam sidang kasus Supriyani	The Judicial Commission (KY) paid particular attention to the hearings of the trial of Supriyani	v			Amplification			v
2.	Penghubung KY Sultra berkepentingan untuk memastikan proses persidangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum yang ada.	The Southeast Sulawesi KY Liaison Office (PKY Sultra) is closely overseeing the court proceedings .	v			Established Equivalence	v		
3.	KY konsisten untuk memantau dan mengawal persidangan ini karena kami ingin memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilakukan dengan baik dan benar.	KY is committed to consistently monitoring and overseeing this trial to ensure that the law enforcement process is carried out properly and in accordance with the law	v			Literal Translation	v		
4.	KY juga senantiasa mengingatkan hakim agar tetap profesional, menjaga integritas dalam memutus	We also continually remind judges to remain professional, uphold their integrity, and	v			Reduction			v



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	perkara tersebut, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun,	resist any external interference,							
5.	Menurutnya, itu juga merupakan salah satu wewenang KY, yaitu melakukan advokasi hakim.	According to him, it would also be one of KY's authorities, that is, to do advocacy for judges.				Literal Translation	v		
6.	Banyaknya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak berbanding lurus dengan upaya penegakan hukumnya	The high number of Human Trafficking (TPPO) victims indicates a gap in law enforcement efforts.	v			Established Equivalence	v		
7.	Namun, hanya 413 yang dibawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan di pengadilan	Out of these, only 413 cases were brought to trial by Public Prosecutors	v			Established Equivalence	v		
8.	Ada yang didakwa dan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , ada dengan UU Pekerja Migran Indonesia, bahkan banyak yang menggunakan UU Keimigrasian	Many individuals are facing significant challenges, charged under the Criminal Code (KUHP) , the Indonesian Migrant Workers Law, or the Immigration Law.	v			Established Equivalence		v	
9.	unsur delik dalam bentuk eksploitasi orang sering jadi tertutup dengan alasan korban telah menandatangani kontrak kerja tanpa dipaksa	the elements of the offense in the form of exploitation of people are often covered up because the victim has signed a work contract without being forced.	v			Established Equivalence	v		
10.	KY akan yang bekerja profesional dengan menyajikan informasi transparan dan akuntabel, partisipatif sehingga menjadi	KY operates with transparency and accountability, promoting public participation and ensuring an independent	v			Established Equivalence			v



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	lembaga kredibel dalam mewujudkan hakim yang mandiri dan berintegritas dengan menjaga dan menegakkan etika hakim ,	judiciary while upholding judicial ethics							
11.	Selain itu masih dapat kekurangan pemahaman tentang jaringan kejahatan TPPO	There is not enough understanding of the TPPO criminal network .	v			Established Equivalence		v	
12.	Hal itu pun tidak semua pelaku lapangan dibawa ke pengadilan, sedangkan aktor intelektual jarang dibawa ke pengadilan	Most legal actions only target field-level perpetrators , while the intellectual leaders behind these crimes are rarely prosecuted.	v			Literal Translation	v		
13.	ditambahkan Sukma, UU TPPO juga memiliki beberapa ketentuan hukum beracara yang berbeda dengan KUHAP, tetapi mirip dengan hukum acara dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum atau perkara penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum	Sukma added that TPPO Law also has several procedural provisions that are different from the Criminal Procedure Code (KUHP) but similar to procedural law in handling cases of women dealing with the law or cases of children dealing with the law	v			Transposition			v
14.	jelas Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.	stated Arie Sudihar, Secretary General of KY, during the Public Monitoring and Evaluation Test for Public Information Disclosure 2024 held by the Central Information Commission	v			Borrowing			v
15.	yaitu meningkatkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel serta	which include enhancing professional, transparent, and accountable public information	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	memberikan layanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan .	services and providing inclusive services sensitive to vulnerable groups .							
16.	KY adalah lembaga mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim .	KY is an independent institution with the authority to appoint supreme justices and other powers to maintain and uphold judges' honor, dignity, and conduct .		v		Amplification	v		
17.	Sebagai informasi, KY meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP)	. KY was awarded the "Informative Public Body" title at the 2023 Public Information Disclosure Awards	v			Literal Translation	v		
18.	Membagikan fakta melalui video, foto, bahkan laporan langsung berasal dari tempat kejadian perkara , sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan.	It enhances transparency and accountability within the police, allowing the sharing of videos, photos, and reports from crime scenes , which become critical evidence in investigations and prosecutions.	v			Established Equivalence	v		
19.	Media sosial juga melahirkan fenomena seperti <i>"no viral, no justice"</i> yang memberikan kritik bagi aparatus penegak hukum untuk lebih concern menangani kasus hukum di masyarakat dan terkesan	Social media has given rise to the phenomenon of 'no viral, no justice,' which criticizes law enforcement officials for their perceived lack of concern in handling legal cases within the	v			Established Equivalence	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	memaksa pemerintah untuk bekerja lebih tangkas dan cepat dalam penegakan hukum.	community							
20.	Jadi hakim terpengaruh tweet atau video viral, bukan keterangan saksi lagi, akan menjadi berbahaya.	Judges are increasingly influenced by social media trends like tweets and viral videos, sometimes overshadowing the importance of witness testimony	v			Literal Translation		v	
21.	Meskipun masyarakat tidak puas dengan kinerja kepolisian saat ini, namun menurut Akbar, jika berbicara kekerasan seksual , maka harus memastikan menjaga kerahasiaan identitas korban	While the public is dissatisfied with the police's current performance, Akbar emphasizes the importance of maintaining the confidentiality of victims' identities when addressing sexual violence .	v			Literal Translation	v		
22.	Sementara perkara yang harus diselesaikan per-24 Desember 2024 di MA ada 30.968 perkara, dan sisa perkara tahun 2023 ada 147 yang belum diputus.	As of December 24, 2024, the MA faces a significant backlog, with 30,968 pending resolutions , including 147 unresolved cases from 2023.	v			Reduction			v
23.	Dalam pertemuan tersebut dibahas soal kekurangan hakim agung di MA.	The meeting addressed the MA's shortage of justice .	v			Modulation			v
24.	Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan ada 4 persoalan penting yang harus diperhatikan dengan serius, yakni judi online , narkoba, penyelundupan, dan korupsi.	President Prabowo Subianto highlighted the need to address four key issues: online gambling , drugs, smuggling, and corruption, which often lead to court cases. Both the MA and KY can play a	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		significant role in tackling these challenges.							
25.	Hal tersebut sempat menjadi kontroversi karena MK mengeluarkan putusan ultra petita , di mana penggugat tidak mengajukan gugatan terkait kewenangan tersebut.	The ruling sparked controversy, as it was seen as an ultra petita decision ; that is, the court addressed an issue that was not explicitly raised by the petitioner in their lawsuit.	v			Borrowing	v		
26.	Namun jika ditemukan ada pelanggaran KEPPH, KY dapat memberikan usulan sanksi , tetapi putusan tetap tidak berubah.	However, if any violations of the KEPPH are identified, KY can recommend sanctions ; nonetheless, the original judgment remains unchanged.	v			Transposition		v	
27.	Misalnya dalam kasus di PN Surabaya. Meskipun ternyata terdapat indikasi ada penyuapan dalam kasus tersebut, putusannya tetap berlaku	For instance, in a case at the Surabaya District Court, there were indications of bribery .	v			Modulation	v		
28.	Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung,	three judges of the Surabaya District Court (PN Surabaya), East Java, were caught in a sting operation (OTT) by the Attorney General's Office (AGO) on Wednesday	v			Discursive Creation			v
29.	Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya , Jawa Timur, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung,	three judges of the Surabaya District Court (PN Surabaya) , East Java, were caught in a sting operation	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		(OTT) by the Attorney General's Office (AGO) on Wednesday.							
30.	KY juga telah menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	KY had also imposed severe sanctions in the form of permanent dismissal with retirement rights and proposed that the reported parties be submitted to the Honorary Council of Justices (MKH)	v			Literal Translation		v	
31.	KY juga telah menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	KY had also imposed severe sanctions in the form of permanent dismissal with retirement rights and proposed that the reported parties be submitted to the Honorary Council of Justices (MKH)	v			Literal Translation		v	
32.	Namun, proses sidang etik melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) belum dilaksanakan karena usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari MA sebab MA masih menunggu putusan kasasi kasus terdakwa GRT	After all, the MA was still waiting for the decision on the cassation of the GRT defendant's case .	v			Literal Translation		v	
33.	Selanjutnya, KY akan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus suap di PN	Furthermore, KY would continue to coordinate with the MA and the AGO to conduct the necessary in-depth investigation for the smooth disclosure of the bribery case	v			Modulation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Surabaya ini	in PN Surabaya.							
34.	Sedangkan kebutuhan hakim agung Kamar TUN khusus pajak urgensinya tinggi	the urgency of the need for a CHA for the Tax Specialized Administrative Chamber (TUN)	v			Literal Translation		v	
35.	KY meloloskan calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak tersebut, dengan alasan kebutuhan perkara pajak yang menumpuk di MA	KY approved the candidate for the CHA of the TUN Chamber due to the backlog of tax cases at the MA.	v			Discursive Creation	v		
36.	Tahap akhir seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA ditentukan oleh DPR yang memiliki hak menyetujui atau menolak calon yang diajukan KY.	The final stage of selecting CHA candidates and ad hoc judges for the MA is determined by the DPR, which holds the authority to approve or reject candidates submitted by KY.	v			Transposition	v		
37.	Kasus tersebut berawal dari laporan pelapor yang merupakan istri sah terlapor.	The case originated from the complainant report, who is the legal wife of the reported party	v			Literal Translation		v	
38.	Namun, ketika RR dimutasi ke PN Trenggalek, ternyata ia tidak mengakhiri hubungan. Bahkan, keduanya akhirnya menikah secara siri pada Desember 2021 di Bogor.	However, when RR was transferred to the Trenggalek District Court, he did not end the relationship and even had an unregistered marriage in December 2021 in Bogor.	v			Modulation	v		
39.	Dalam proses pembelaan di MKH, maka ditemukan beberapa fakta terbaru.	During the defense process at MKH, several new facts were discovered	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

40.	baik dari praajudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi akan membawa dampak lain dari hukum terbang pilih	both from pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication, will bring another impact from discriminative law	v			Discursive Creation	v		
41.	Oleh karena itu, kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah, terutama dalam reformasi peradilan.	Therefore, gender equality is necessary in any government program design, notably in judicial reform.	v			Literal Translation	v		
42.	Media dengan temuan faktanya dapat membawa <i>multiplier effect</i> bagi aparat penegak hukum ataupun pelaku hukum itu sendiri.	The media's fact findings could have a <i>multiplier effect</i> on law enforcement officials or the perpetrators of the law themselves.	v			Modulation			v
43.	ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat membahas ketidakadilan gender di Indonesia dalam proses peradilan yang disampaikan dalam pelatihan tematik “Perempuan Berhadapan dengan Hukum” di Semarang	said Press Council Chairperson Ninik Rahayu when discussing gender injustice in Indonesia in court processes during a thematic training on "Women Before the Law" in Semarang, Wednesday (7/8/2024).	v			Literal Translation			v
44.	Hal ini tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, juga termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan.	This situation could be found in the low quality of life and role of women, as well as the high number of cases of violence against women.	v			Literal Translation	v		
45.	Misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan	This includes education, employment, and inheritance issues	v			Modulation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

46.	Calon hakim agung kamar Agama pertama yang diwawancara pada Kamis (11/7/2024) di Auditorium KY, Jakarta adalah Hakim Tinggi Yustisial di Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) Lailatul Arofah.	The first candidate for Supreme Court justice in the Religious Chamber to be interviewed on Thursday (11/7/2024) at KY Auditorium, Jakarta, was Supreme Court Supervisory Agency (Bawas MA) Judicial Assistant Judge Lailatul Arofah.	v			Literal Translation			v
47.	Metode ini dulu sering dijadikan model penyelundupan hukum bagi WNI yang ingin menikah beda agama	This method was often used as a model of legal smuggling for Indonesian citizens who wanted to have an interfaith marriage .	v			Literal Translation	v		
48.	Jika terjadi perceraian, untuk hak asuh anak di bawah 12 tahun, menurut ajaran Islam maka ikut ibunya. Namun, sekarang ada banyak permintaan pengasuhan bersama. Jika berdasarkan kesepakatan kedua orang tua, maka dapat dilakukan pengasuhan bersama .	In the event of a divorce, for custody of children under 12 years old, according to Islamic teachings, the child would go to the mother. However, there are now many requests for joint custody .	v			Literal Translation	v		
49.	Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Akibat perceraian yang lain apakah hak asuh anak, atau harta bersama , dan lain-lain dapat diselesaikan di luar persidangan.	The divorce must be done in front of a court session. Other consequences of divorce, such as child custody, joint property , etc.	v			Literal Translation		v	
50.	Calon hakim agung kamar Pidana	Supreme Court Justice							



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Abdul Aziz ditanya pendapatnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus peretasan hingga kebocoran data pada Pusat Data Nasional (PDN).	candidate for Criminal Chamber Abdul Aziz was asked his opinion regarding criminal liability in the case of hacking and data leakage at the National Data Center (PDN).		v		Literal Translation		v	
51.	Komisi Yudisial (KY) menerima 267 laporan dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari hingga April 2024.	From January to April 2024, The Judicial Commission (KY) received 267 reports and 197 copies of alleged violations of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH).	v			Literal Translation	v		
52.	Tiga jenis pelanggaran KEPPH teratas didominasi oleh bersikap tidak profesional, keberpihakan kepada pihak berperkara dan penerimaan suap atau gratifikasi	The top three types of KEPPH violations are dominated by unprofessional conduct, favoritism towards litigants , and the receipt of bribes or gratuities.	v			Modulation		v	
53.	bentuk pelanggaran nya bisa terkait pertimbangan hukum yang kurang,	The form of violation can be related to insufficient legal considerations.	v			Literal Translation	v		
54.	Sesuai dengan kewenangan, KY mengusulkan penjatuhan sanksi pada 42 hakim.	By its authority, KY proposed imposing sanctions on 42 judges.	v			Literal Translation		v	
55.	sanksi berat terhadap 17 hakim, maksimal sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan sebagai hakim	Severe sanctions were imposed on 17 judges, with the maximum sanction being a dishonor discharge from his	v			Modulation		v	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		position as a judge							
56.	Amzulian tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada MA sebagai mitra terdekat KY yang secara bahu-membahu dan bersama-sama memiliki keinginan dan tekad yang sama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan dipercaya masyarakat.	Amzulian also conveyed his appreciation to the MA as KY's closest counterpart with the same spirit and commitment to create a clean judiciary and public trust.	v			Literal Translation	v		
57.	Padahal dalam temuan Komisi Yudisial (KY), banyak peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) yang mengarah serius terjadi di perkara-perkara perceraian di PA.	In fact, in the findings of the Judicial Commission (KY), many Derogatory Acts against Judges (PMKH) incidents have led to severe cases in divorce cases at the PA.	v			Established Equivalence	v		
58.	Bahwa pada perkara hukum keluarga , yang melibatkan hati dan perasaan, perlu diantisipasi terjadinya potensi PMKH yang bisa berdampak cukup serius	In family law cases involving people's emotions, it is necessary to anticipate the potential of the PMKH, which could have a serious impact	v			Literal Translation	v		
59.	Seolah permasalahan klasik, tetapi sebenarnya kendala paling mendasar adalah identifikasi atau persepsi semua pihak yang kadang keliru terhadap tipologi perkara yang dihadapi di pengadilan.	It would seem like a classic problem, but the most fundamental obstacle was the identification or perception of all parties who sometimes needed to understand the typology of cases faced in court.	v			Literal Translation	v		
60.	Karena kita bicara mengenai	Because we are discussing							



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	pengamanan pengadilan dan hakim, semoga itu tidak menjadi tameng dalam menutupi penyimpangan yang ada, tetapi lebih sebagai perisai independensi hakim	securing courts and judges, let's hope that it will not be a shield to cover up existing irregularities but more as a shield for the judge's independence	v			Modulation	v		
61.	Untuk itu, Kadafi berharap kesimpulan dan rekomendasi diskusi ini bisa menjadi awalan bagi para pelaku peradilan guna mengkonkretkan upaya bersama menjaga peradilan yang bersih dan mandiri.	For this reason, Kadafi hoped that the conclusions and recommendations of this discussion could be a start for judicial actors to concretize joint efforts to maintain a clean and independent judiciary.	v			Literal Translation		v	
62.	Kami berharap para pelaku peradilan agar bisa memberikan kontribusinya dalam upaya kita bersama mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, yang aman tidak hanya bagi hakim, tapi juga bagi pelaku peradilan yang lain, juga termasuk pencari keadilan dan pengunjung sidang	"We hope that judicial actors can contribute to our joint efforts to create a clean, independent judiciary, one that is safe not only for judges but also for other judicial actors, including justice seekers and court visitors,	v			Literal Translation		v	
63.	Calon ditanya mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin .	The candidate was asked about the Supreme Court Regulation (Perma) No. 5 of 2019 on the Guidelines for the Adjudication of Applications for Marriage Dispensation	v			Literal Translation			
64.	Ibu lah yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam kasus seperti ini, maka harus betul-	The mother conceives, gives birth, and breastfeeds. In such cases, we must offer a wise and	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	betul kita memberikan suatu nilai keadilan yang arif dan bijaksana,	prudent value of justice ,							
65.	Sehingga ketika dalam konteks penegakan hak ciptanya , orang yang menyuruh itu (pemiliknya).	So that in the context of copyright enforcement , the person who ordered it (the owner) is responsible.	v			Literal Translation	v		
66.	Bisa jadi, lanjut Ennid, suatu ketika AI dapat menjadi subjek hukum tetapi secara fiksi.	Whether AI will become a legal subject , AI may one day become it, but fictionally.	v			Literal Translation	v		
67.	contoh badan hukum . Badan hukum itu hanya tumpukan kertas, SK dari menteri dan lain-lain. Namun sekarang dianggap sebagai subjek hukum sehingga dimungkinkan	For example is a legal entity . It is just a pile of paper, a decree from the minister and others. But now it is considered a legal subject, so it is possible	v			Literal Translation	v		
68.	Khusus tentang yayasan, konsepnya berupa harta yang dipisahkan dan nonprofit. Jadi, sudah tidak bertuan lagi karena sudah diserahkan untuk kepentingan umum.	Specifically, foundations are separate charitable assets that can no longer be inherited because they have been given in the public interest.	v			Modulation			v
69.	Sehingga demikian, ahli warisnya sudah tidak berhak menggugat yayasan itu lagi. Jika ada masuk gugatan perdata terkait ini, secara tegas akan ditolak	Therefore, his heirs no longer have the right to sue the foundation. If a civil lawsuit is related to this, it will be firmly rejected,	v			Established Equivalence	v		
70.	Prinsipnya dalam dasar normatif, keputusan yang dikeluarkan dalam rangka bencana alam, perang, dan kondisi yang luar biasa membahayakan negara bukan menjadi kewenangan PTUN, sesuai	Principally, on a normative basis, decisions issued in the context of natural disasters, war, and extraordinary conditions endangering the state are not the authority of	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pasal 49 UU PTUN	State Administrative court compatible with Article 49 of the State Administrative Court Law							
71.	Salah satunya, hilangnya kewenangan PTUN atas upaya hukum fiktif positif yang sebelumnya diatur Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	The Supreme Court Circular Letter has also argued that with Law No. 30 of 2014, the State Administrative Court no longer has the authority to examine positive fictitious lawsuits	v			Modulation	v		
72.	Calon ditanya pendapatnya soal wacana pemiskinan bagi koruptor.	He was asked his view on the issue of impoverishment for corruptors.	v			Modulation	v		
73.	Calon ditanya pendapatnya soal wacana pemiskinan bagi koruptor.	He was asked his view on the issue of impoverishment for corruptors.	v			Modulation	v		
74.	Mulai dari pengumpulan alat bukti oleh penyelidik dan penyidik Polri , yang kemudian disusun dalam bentuk dakwaan oleh penuntut umum hingga berkasnya lengkap, hingga proses di pengadilan.	Starting from the collection of evidence by police detectives and investigators , which were then compiled in the form of an indictment by the public prosecutor until the file was completed, up to the process in court.		v		Established Equivalence	v		
75.	Menurutnya, PK memang dapat dilakukan untuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak termasuk putusan praperadilan.	According to him, PK could indeed be carried out for court decisions with permanent legal force but excluding pretrial decisions.	v			Literal Translation			v
76.	Dalam hukum merek itu sangat penting.	In brand law , it is essential.	v			Literal Translation			v



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

77.	Juga menerapkan <i>mareva injunction</i> atau perintah pembekuan atau perlindungan aset atau <i>anton pillar order</i> atau perintah pengadilan yang memberikan hak untuk menggeledah tempat dan menyita barang bukti tanpa peringatan sebelumnya.	It also applies a <i>Mareva injunction</i> , a freezing or asset protection order , an <i>anton pillar order</i> , or a court order granting the right to search premises and seize evidence without prior warning.		v		Modulation	v		
78.	Juga menerapkan <i>mareva injunction</i> atau perintah pembekuan atau perlindungan aset atau <i>anton pillar order</i> atau perintah pengadilan yang memberikan hak untuk menggeledah tempat dan menyita barang bukti tanpa peringatan sebelumnya.	It also applies a <i>Mareva injunction</i> , a freezing or asset protection order, an <i>anton pillar order</i> , or a court order granting the right to search premises and seize evidence without prior warning.	v			Literal Translation	v		
79.	Calon juga diminta pendapatnya soal sengketa sertifikat tanah ganda .	He was also asked for his opinion on the dispute over multiple land certificates .	v			Amplification	v		
80.	Sesudah jelas pemiliknya, barulah pemilik sertifikat yang sah melakukan pembatalan sertifikat yang dimiliki pemilik yang tidak benar itu ke PTUN," urai Mustamar	After the owner is clear, then the legitimate certificate owner can cancel the certificate owned by the incorrect owner to the PTUN," Mustamar explained	v			Transposition	v		
81.	Menjatuhkan sanksi disiplin kepada terlapor dengan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap seperti dimaksud Pasal 19 ayat 4 huruf d Peraturan Bersama MA dan	Imposing disciplinary sanctions on the Reported Party with a severe disciplinary sanction in the form of permanent dismissal as	v			Modulation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH," ujar Hakim Agung Nurul Elmiyah yang bertindak sebagai ketua sidang MKH.	referred to in Article 19, paragraph 4 letter d of the Joint Regulation of the MA and the KY Number 02/PB/MA/IX/2012 and Number 02/PB/P.KY/09/2012 concerning Guidelines for Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges or KEPPH,						
82.	Menjatuhkan sanksi disiplin kepada terlapor dengan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap seperti dimaksud Pasal 19 ayat 4 huruf d Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH," ujar Hakim Agung Nurul Elmiyah yang bertindak sebagai ketua sidang MKH.	Imposing disciplinary sanctions on the Reported Party with a severe disciplinary sanction in the form of permanent dismissal as referred to in Article 19, paragraph 4 letter d of the Joint Regulation of the MA and the KY Number 02/PB/MA/IX/2012 and Number 02/PB/P.KY/09/2012 concerning Guidelines for Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges or KEPPH,	v			Literal Translation	v	
83.	“(Hakim akan) berusaha mendapatkan bukti <i>se-firm</i> dan sevalid mungkin agar memudahkan dalam proses pembuktian di persidangan	(Judges will) try to obtain evidence <i>as firm</i> and valid as possible to facilitate the proof process at trial ,	v			Literal Translation		v
84.	Saya tetap menganjurkan agar para	I would still recommend that the						



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	korban memberikan kesaksian dalam persidangan dengan sebenar-benarnya dan dengan sumpah	victims testify in the trial truthfully under oath,	v			Literal Translation		v	
85.	Bonifasius memandang bahwa HAM, hak masyarakat adat dan ulayat , dan lingkungan mesti didahulukan daripada investasi.	Bonifasius viewed HAM, the rights of Indigenous and customary communities , and the environment as having to take precedence over investment.	v			Amplification	v		
86.	Termasuk dalam proses perizinan itu sebenarnya konten-konten tentang HAM, perlindungan lingkungan hidup, observasi sumber daya alam, dan lingkungan masyarakat menjadi salah satu syara	Including in the licensing process , content on human rights, environmental protection, observation of natural resources, and the community environment is one of the prerequisites	v			Transposition	v		
87.	Agus juga menjelaskan mengenai kekerasan PKI tahun 1965, di mana pada masa tersebut PKI secara histori memiliki anggota yang banyak sekali.	Agus also explained about the 1965 PKI atrocities , during which time the party historically had a significant number of members.	v			Established Equivalence		v	
88.	Pertanyaannya adalah PKI ini korban atau pelaku kekerasan yang pada waktu itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh negara.	The question is whether the PKI is a victim or perpetrator of a crime which at that time was declared a banned organization by the state	v			Literal Translation	v		
89.	Agus melanjutkan, kemudian munculah lembaga yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) .	Agus continued; later, the Truth and Reconciliation Commission (TRC) emerged.		v		Literal Translation	v		
90.	Padahal seharusnya, perkara keberatan atau gugatan selesai dalam 6 bulan, banding dalam 12	In fact, objection or lawsuit cases should be completed in 6 months and appeal cases in 12		v		Established Equivalence	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	bulan	months.							
91.	Hari juga ditanyakan mengenai kesalahan penulisan isi putusan .	There was also a question about errors in writing the decision's content .	v			Literal Translation			v
92.	Jika salah, kami harus membetulkan dengan sidang pembetulan , karena hukum acaranya berkehendak seperti itu	And we must correct it through a corrective hearing because the procedural law requires it	v			Modulation			v
93.	Alimin juga memberi perhatian terhadap kasus adat .	Alimin also paid attention to customary cases .	v			Transposition	v		
94.	Jadi hanya karena perusahaan memiliki hak pengelolaan , bukan berarti memiliki hak untuk menghancurkan.	Thus, just because a company had management rights would not necessarily mean it had the right to destroy it.	v			Literal Translation			v
95.	Jadi lahan tersebut dikeluarkan dari izin pengelolaan	Therefore, the land was removed from the management permit	v			Literal Translation	v		
96.	Bersama dengan Biro Pengawasan Perilaku Hakim, di tahun lalu ada 15 kasus yang akan dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) .	Last year, in the Judges Conduct Supervision Bureau, there were 15 cases to be brought to the Honorary Assembly of Justice (MKH) .	v			Transposition		v	
97.	Bahwa sebagai pengawas internal tidak ada keinginan untuk melindungi, tapi bukan untuk membunuh, untuk memperbaiki.	As an internal supervisor , MA has no desire to protect or kill but to fix it.	v			Literal Translation		v	
98.	Ia melanjutkan bahwa jangan beranggapan MA ingin melindungi aparatur pengadilan yang berperilaku buruk.	Never assume that the MA wants to protect court apparatus who misbehave	v			Literal Translation	v		
99.	Pemeriksaan terdakwa dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan , setelah sidang diskors dilanjutkan pembacaan	The reading of the charges followed the examination of the defendant, and after the hearing	v			Literal Translation	v		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	pledo.	was adjourned, the reading of the pledge proceeded							
100.	Pemeriksaan terdakwa dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan, setelah sidang diskors dilanjutkan pembacaan pledo.	The reading of the charges followed the examination of the defendant , and after the hearing was adjourned, the reading of the pledge proceeded	v			Literal Translation	v		
101.	KY has recommended strict sanctions , including permanent dismissal with pension rights, for the three judges of PN Surabaya.	“KY sebenarnya sudah merekomendasikan sanksi tegas berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim PN Surabaya tersebut,”	v			Literal Translation		v	
102.	Additionally, the KY has addressed reports concerning four children who are facing legal charges after being victims of wrongful arrest in Tasikmalaya.	Selanjutnya, KY juga telah melakukan penanganan laporan kasus 4 anak berhadapan dengan hukum yang merupakan korban salah tangkap di Tasikmalaya.	v			Transposition	v		
103.	The third input from KY includes arrangements for wiretapping and forced summons that fall outside the scope of criminal law enforcement.	Masukan ketiga dari KY termasuk pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana.		v		Literal Translation	v		
104.	Ada yang didakwa dan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , ada dengan UU Pekerja Migran Indonesia, bahkan banyak yang menggunakan UU Keimigrasian	Many individuals are facing significant challenges, charged under the Criminal Code (KUHP) , the Indonesian Migrant Workers Law, or the Immigration Law.	v			Literal Translation	v		
105.	"KY sangat mengapresiasi langkah pemerintah, MA, dan semua pihak	"KY greatly appreciates the government, MA, and all parties'			v	Literal Translation			



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	yang telah terlibat dalam upaya kenaikan gaji dan tunjangan jabatan hakim, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 diterbitkan," ujar Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata merespons terbitnya PP No. 44/ 2024 ini.	efforts involved in improving salaries and allowances for judges so that the PP Number 44 of 2024 is issued," said KY Member and KY Spokesperson Mukti Fajar Nur Dewata responding to the issuance of the regulation.					v		
106.	Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in menjelaskan soal penolakan usulan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Jakarta. The head of Center for Analysis and Information Services, Juma'in , explained the rejection of the proposal for candidates for Supreme Court Justice (CHA) and candidates for ad hoc human rights judges at the Supreme Court (MA) by the House of Representatives (DPR).			v	Literal Translation	v		

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA